



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI KELAS II

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



pn.pangkalanbalai@gmail.com



Jl. Perkantoran Pemkab, Kedondong Raye, Kec.
Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30911

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya lah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II dapat menyusun “RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Tahun 2025-2029”, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Renstra ini merupakan acuan dalam merencanakan, merumuskan dan menyusun program kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai periode 2025–2029.

Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen rencana strategis ini dapat tersusun, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.



Pangkalan Balai 3 Februari 2025
KETUA

FITRI AGUSTINA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBARError! No table of figures entries found.Error! No table of figures entries found.	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Kondisi Umum	6
1.1.1. Sumber Daya Manusia	7
1.1.2 Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)	10
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	14
2.1. Visi	14
2.2. Misi	14
2.3. Tujuan Dan Sasaran Strategis	14
2.4. Sasaran Strategis	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	16
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI	16
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	17
3.3. Kerangka Regulasi	21
3.4. Kerangka Kelembagaan	23
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	33
4.1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 2025-2029	34
4.2. MATRIKS RENSTRA 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	36
BAB V PENUTUP	42
LAMPIRAN	44
MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	46
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 2025-2029	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil	7
Tabel 1. 2. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Lanjutan)	8
Tabel 1. 3. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Lanjutan)	9
Tabel 1. 4. Sumber Daya Manusia Tenaga Honorar (PPNPN)	10
Tabel 3. 1. Kerangka Regulasi	21
Tabel 3. 2. Kerangka Regulasi (Lanjutan)	22
Tabel 4. 1. Matriks Kinerja Dan Pendanaan 2025-2029	34
Tabel 4. 2. Matriks Kinerja Dan Pendanaan 2025-2029 (Lanjutan)	35
Tabel 4. 3. Matriks Renstra 2025-2029 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Halaman Depan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	15
Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah

Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.1.1. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah tenaga Hakim dan Pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dinilai masih kurang, dan juga jumlah Hakim yang kurang sebanding dengan beban Perkara Pidana dan Perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dari tahun ketahun.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai hingga laporan ini dibuat berjumlah 38 (tiga puluh delapan) Orang personil yang terdiri dari 5 (lima) Orang Hakim, 8 (Delapan) Orang Pejabat Struktural, 10 (sepuluh) Orang Pejabat Fungsional, 6 (enam) Orang Pelaksana, 1 (satu) orang PPPK dan 8 (delapan) Orang PPNP

Tabel 1. 1. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	KET
1.	FITRI AGUSTINA, S.H.	Ketua	Pembina Tk. I	IV/b	
2.	VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina	IV/a	
3.	HARI MUKTIYONO, S.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
4.	SYARIFA YANA, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
5.	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
6.	BAINAL HAKIM, S.H.	Panitera	Penata Tk.I	III/d	
7.	ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.	Sekretaris	Penata Tk.I	III/d	
8.	A HAIRUN YULASNI, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tk.I	III/d	

Tabel 1. 2. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Lanjutan)

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	KET
9.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Penata Tk.I	III/d	
10.	BENY HERLAMBANG, S.H.	Panitera Muda Perdata	Penata Tk.I	III/d	
11.	MUHAMMAD IMAN SEPTIAN, S.IP.	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I	III/d	
12.	MUTIARA SAPUTRI, S.E.	Kepala Sub Bagian	Penata Muda Tk. I	III/b	
13.	RAHMAT JUNIANSYAH	Kepala Sub Bagian	Penata Muda Tk.I	III/b	
14.	ISNATA TAKASURI, S.H	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	
15.	WENNY PUSPITA SARI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
16.	AL IHSAN ALAMSYUR, S.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
17.	BRENDY SUTRA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
18.	YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
19.	MATHYAS ADINATA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
20.	HIKMAWATI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
21.	M. BUDIANTO, S.E	Jurusita	Penata Muda Tk. I	III/b	
22.	MELLY NORVIANA, A.Md	Jurusita	Penata Muda Tk. I	III/b	
23.	MARDHIYAN SAPUTRA, A.Md.	Jurusita	Penata Muda Tk. I	III/b	

Tabel 1. 3. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Lanjutan)

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	KET
24.	ENDANG AZHARI	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda Tk. I	III/b	
25.	JIHAN PUTRI ZUZANGGI, S.H.	Klerek – Analis Perkara Peradilan	Penata Muda Tk. I	III/a	
26.	ZULPAN ARYANTO	Klerek – Pengadministras i Perkantoran	Pengatur Tk. I	II/d	
27.	DEA ANGGITA, A.Md.	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Pengatur Tk. I	II/c	
28.	PRAMUJI WIDODO, A.Md., S.E.	Klerek – Analis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
29.	EUNIKE MAYERNI BATUBARA , A.Md. AB	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	Pengatur	II/c	
30.	MAHMUDAH, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana	VII	VII	

1.1.2 Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)

Tabel 1. 4. Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)

No.	Nama	Jabatan	Ket
1.	ERWANZA	Pengamanan	
2.	FAISAL RIFA'I, A.Md	Pengemudi	
3.	ABDUL HADI	Pramubakti	
4.	FADHIEL YUSUF, S.H.	Pramubakti	
5.	M. RAMADHONI, S.H.	Pengamanan	
6.	CITRA PUSPITA SARI, S.T.	Pramubakti	
7.	MUHAMMAD NOUVAL DWI ADITYA, A.MD. KOM	Pramubakti	
8.	RISKA YANTI, S.H.	Pramubakti	

A. Potensi Dan Permasalahan

Dari Analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, potensi permasalahan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dipetakan kembali melalui analisa SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategis untuk menganalisa dan mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkan aktor *Strengths*, *Weaknesses*, *Opportunities* dan *Threats* dalam sebuah organisasi dan bisnis. Metode ini diperkenalkan oleh Albert Humprey dalam sebuah Kongres di Stanford University pada 1960 dan 1970.

A. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *provost* (kawal depan) di wilayah propinsi

Sumatera-Selatan dan kepulauan Sumatera khususnya Kabupaten Banyuasin

2. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan unsur *Forkompinda* sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor 118-0260 Tahun 2016, Tanggal 16 Februari 2016.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai secara aturan dan keadaan saat ini untuk tahun 2023 sudah dapat mengusulkan untuk peningkatan kelas peradilan dari kelas II (dua) menjadi kelas IB (satu B).
6. Berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2024, Nomor B/1397/M.KT.01/2024 bahwasanya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dari semula kelas II B naik kelas menjadi I B

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Peradilan secara internal.
2. Kurangnya alokasi anggaran terutama bagi pemenuhan sarana dan prasarana
3. Belum meratanya kemampuan sumber daya manusia pegawai.
4. Pelayanan Publik belum maksimal.

5. Masih terbatasnya Infrastruktur pelayanan publik.
6. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya.
7. Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan peradilan secara internal peradilan menyangkut kepaniteraan dan kesekretariatan.
8. Kurangnya pegawai yang mendukung pelaksanaan Tupoksi terutama dibagian pelaksana

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai landasan peradilan.
2. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
3. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada.
4. Struktur Organisasi dengan nomenklatur yang baru.
5. Sudah adanya apresiasi terhadap kinerja pegawai yang dapat menjadi motivasi untuk berkembang melalui program punishment and reward
6. Adanya Agen perubahan dan Role Model sebagai motivasi dan contoh dalam penerapan kinerja menuju peningkatan

D. Tantangan Yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara

terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:

1. Terbatasnya sumber dana atau anggaran terutama setelah munculnya pagu indikatif
2. Terbatasnya sarana dan prasarana.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang ada terutama untuk bagian pelaksana

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

Visi

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung”

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

MISI

- ***Memberikan Pelayanan Hukum Yang Agung Kepada Pencari Keadilan***
- ***Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai***
- ***Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai***

2.3. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan kredibilitas, profesional dan transparan.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan masyarakat bangsa dan negara.
4. Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sasaran strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.



Gambar 2. 1. Halaman Depan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, telah menetapkan visi, yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010–2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu:

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan.
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada:

1. Fungsi Peradilan.
2. Manajemen Perkara.
3. Manajemen Sumber Daya Manusia.
4. Manajemen Sumber Daya Keuangan.
5. Manajemen Sarana dan Prasarana.
6. Manajemen Informasi Teknologi.
7. Transparansi Peradilan.
8. Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Penyempurnaan penerapan sistem kamar.
- Pembatasan perkara kasasi.
- Proses ber perkara yang sederhana dan murah.
- Penguatan akses peradilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut:

- Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.
- Sidang keliling/ *zitting plaats*.
- Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Khusus Pembebasan biaya perkara dan sidang keliling Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tetap berusaha untuk mengajukan anggaran tersebut khususnya dalam hal ini untuk tahun 2025 dan tahun-tahun seterusnya guna memberikan pelayanan bagi masyarakat khususnya wilayah hukum Pangkalan Balai

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Presentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti meningkat. 4 (empat) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang mengacu pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan. Indikator kinerja program yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam pelaksanaan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum adalah:

1. Terselenggaranya penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum.
3. Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum.
4. Terselenggaranya tata laksana perkara kasasi dan PK.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bertujuan untuk pencapaian sasaran strategis terhadap peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung layanan peradilan.

3.3. Kerangka Regulasi

Tabel 3. 1. Kerangka Regulasi

No.	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Ket
1.	Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	• Peningkatan penyelesaian perkara. • Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	• Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara.	• SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume zitting plaats, posbakum, dan perkara prodeo.	• Dirjen Badilum	
		• Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. • Peningkatan Kualitas SDM.	• Penambahan volume zitting plaats, posbakum, perkara prodeo. • Peningkatan pelayanan publik. • Standardisasi pelaksanaan.	• Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik • Juklak/ juknis pelaksanaan bimtek. • Juklak/ juknis tentang percepatan.		

Tabel 3. 2. Kerangka Regulasi (Lanjutan)

No.	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Ket
2.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi.	Badan Urusan Administrasi MA RI	
3.	Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA tentang standardisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Badan Urusan Administrasi MA RI	

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pembagian tugas pokok dan fungsi pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu:

❖ KETUA DAN WAKIL

Pasal 1

- 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- 3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- 4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

❖ KEPANITERAAN

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus.
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara,

penyajian data perkara dan transparansi perkara.

6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
7. Pelaksanaan mediasi.
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

1. Panitera Muda Perdata.
2. Panitera Muda Pidana.
3. Panitera Muda Khusus.
4. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.

4. Pelaksanananaan pengelolaan administrasi perkara khusus.
5. Pelaksanananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
6. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
7. Pelaksanaan mediasi.
8. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat

pertama kepada para pihak yang tidak hadir.

6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi..
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana.

3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

❖ **KESEKRETARIATAN**

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 5

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas:

1. Sekretariatan Peradilan Umum.
2. Sekretariatan Peradilan Agama.
3. Sekretariatan Peradilan Militer.
4. Sekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 286

- 1) Sekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Sekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Sekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

3. Pelaksanaan urusan keuangan.
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
3. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

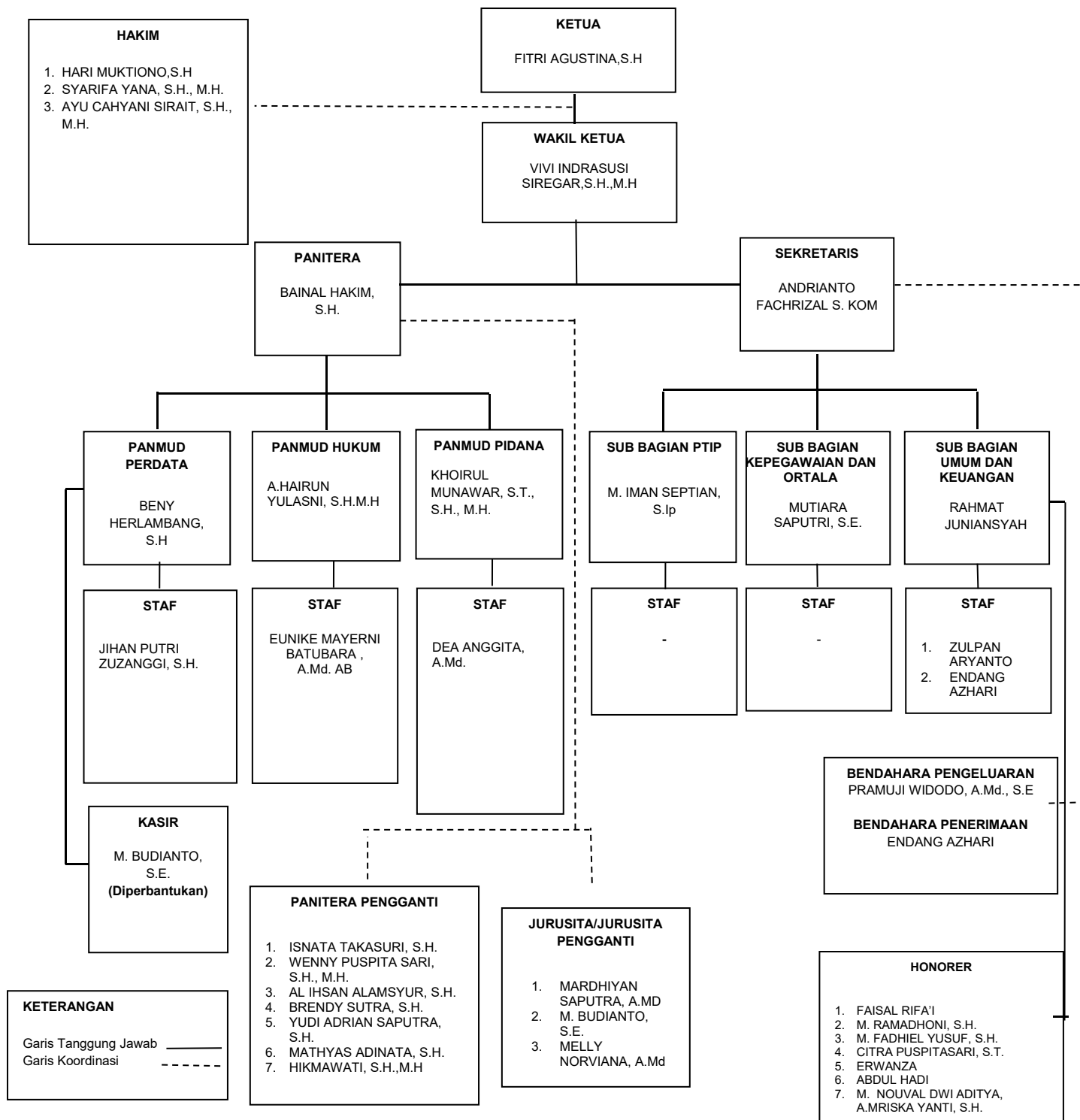
Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjadi pedoman dalam pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun kedepan yaitu tahun 2025-2029 dengan menggunakan anggaran DIPA No. SP DIPA- 005.01.2.401909 (dari Badan Urusan Administrasi) dan DIPA No. SP DIPA- 005.03.2.402017 (dari Dirjen Badan Peradilan Umum) untuk mencapai target kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) untuk jangka waktu tahun 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Matriks Kinerja Dan Pendanaan 2025-2029

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENDANAAN TAHUN 2025
			2025	2026	2027	2028	2029	
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Dukungan Manajemen	Terwujudnya Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal DIPA 01	100	100	100	100	100	5.077.615.000
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	92	92	92	92	92	123.990.000
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100	100	100	100	100	
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	10	10	10	10	10	
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	95	95	95	95	
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	85	85	85	85	
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	90	90	90	90	90	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100	100	100	100	100	

Tabel 4. 2. Matriks Kinerja Dan Pendanaan 2025-2029 (Lanjutan)

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENDANAAN TAHUN 2025
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	123.990.000
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	14	14	14	14	14	
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	28.000.000
	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	40	40	40	40	-

Kegiatan T.A 2025

DIPA No. SP DIPA- 005.01.2.401909/2025 : Rp.5.077.615.000

DIPA No. SP DIPA- 005.03.2.402017/2025 : Rp.151.990.000

4.3. MATRIKS RENSTRA 2025-2029 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang Agung
- Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Tabel 4. 3. Matriks Renstra 2025-2029 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
	Menciptakan kredibilitas, profesional dan transparan	Persenase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92	92	92	92	92

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
					Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
					Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10	10	10	10	10
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	95	95	95	95

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	85	85	85	85
					Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90	90	90	90	90
					Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	100	100	100	100

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
					Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
					Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	14	14	14	14	14
	Menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan masyarakat	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
	Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan	Persentase Putusan Perkara Yang Ditindak Lanjuti Melalui Eksekusi	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40	40	40	40	40

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Blue Print Mahkamah Agung yang terkait dengan *roadmap* tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Selain itu penyusunan rencana strategis ini dihadapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2025-2029 diuraikan hal-hal yang akan atau menjadi target yang harus dicapai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan,

meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, terget kinerja tahunan dan kebutuhan akan pendanaan.

LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 2/KPN.W6-U10/SK.RA1.3/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

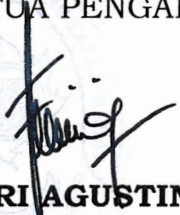
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

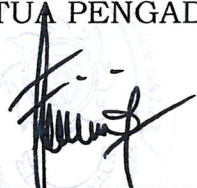

FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 2/KPN.W6-U10/SK.RA1.3/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2025**

No.	Jabatan	Nama
1.	Pembina	Fitri Agustina, S.H.
2.	Penganggung Jawab	Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Bainal Hakim, S.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Andrianto Fachrizal, S.Kom.
5.	Pelaksana	1. A. Hairun Yulasni, S.H., M.H. 2. Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. 3. Beny Herlambang, S.H. 4. Rahmat Juniansyah 5. Mutiara Saputri
6.	Tim Pengelola Data	1. M. Iman Septian, S.IP. 2. M. Nouval Dwi Aditya, A.Md.

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



FITRI AGUSTINA

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 1/KPN.W6-U10/RA1.10/I/2025**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Agustina, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nugroho Setiadji, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 2 Januari 2025

Pihak Kedua

Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang,

NUGROHO SETIADJI, S.H.
NIP. 196006291985121001

Pihak Pertama

Ketua

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,

FITRI AGUSTINA, S.H.
NIP. 197908252006042002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 1/KPN.W6-U10/RA1.10/I/2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	10
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
		Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	14
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40

Kegiatan		Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	5.077.615.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	0
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	151.990.000,-

Pihak Kedua

Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang,



[Signature]
NUGROHO SETIADJI, S.H.
NIP. 196006291985121001

Palembang, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Ketua

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,



[Signature]
FITRI AGUSTINA, S.H.
NIP. 197908252006042002

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Instansi : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	<i>Menciptakan kredibilitas, profesional dan transparan</i>	<i>Persenase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	<i>100</i>	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92	92	92	92	92

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
2.					b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
3.					c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10	10	10	10	10
4.					d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	95	95	95	95
5.					e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	85	85	85	85

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
6.					f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90	90	90	90	90
7.					g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	100	100	100	100
8.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
9.					b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
10					c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	14	14	14	14	14
11	<i>Menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan masyarakat</i>	<i>Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum</i>	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
12	Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan	Persentase Putusan Perkara Yang Ditindak Lanjuti Melalui Eksekusi	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40	40	40	40	40

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 2025-2029

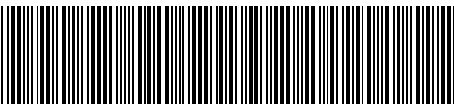
PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENDANAAN TAHUN 2025
			2025	2026	2027	2028	2029	
Dukungan Manajemen	Terwujudnya Dukungan Manajemen	Terwujudnya Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal DIPA 01	100	100	100	100	100	5.077.615.000
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	92	92	92	92	92	123.990.000
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100	100	100	100	100	
		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	10	10	10	10	10	
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95	95	95	95	95	
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	85	85	85	85	
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	90	90	90	90	90	
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100	100	100	100	100	

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENDANAAN TAHUN 2025
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	123.990.000
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	14	14	14	14	14	
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	28.000.000
	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	40	40	40	40	40	-

Kegiatan T.A 2025

DIPA No. SP DIPA- 005.01.2.401909/2025 : Rp.5.077.615.000

DIPA No. SP DIPA- 005.03.2.402017/2025 : Rp.151.9



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.401909/2025**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
- 3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
- 4. Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
- Sebesar : Rp. 5.077.615.000 (LIMA MILIAR TUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.01.WA Program Dukungan Manajemen
005.01.WA. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Jumlah Uang

Rp. 5.077.615.000
Rp. 5.077.615.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.077.615.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN S E K A Y U (160) Rp. 5.077.615.000

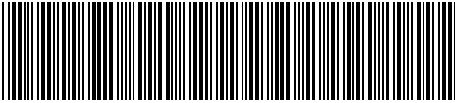
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7473-4678-1133-8594

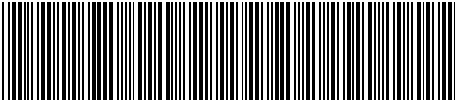
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

								Halaman : I A. 1
Program	:	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen					5.077.615.000
Kegiatan	:	6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama					5.077.615.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)					
		2. 02	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)					
		3. 03	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)					
		4. 04	Kualitas Pelayanan Informasi Publik					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5.077.315.000
Rincian Output	:	01	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Laporan		700.000
		02	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		5.076.615.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		300.000
Rincian Output	:	01	EBD.953					300.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2025
I B. SUMBER DANA



DS:7473-4678-1133-8594

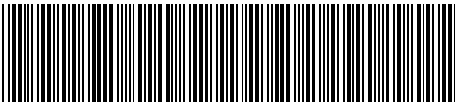
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	5.077.615.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	5.077.615.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7473-4678-1133-8594

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Kewenangan : (KD)

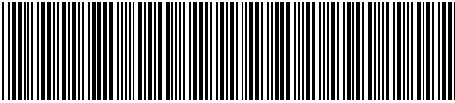
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	3.683.882	1.393.733	-	-	-	5.077.615	11 . 09	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.683.882	1.393.733	-	-	-	5.077.615		
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	3.683.882	1.393.733	-	-	-	5.077.615		
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	3.683.882	1.393.433	-	-	-	5.077.315		
01 RM		3.683.882	1.393.433	-	-	-	5.077.315		
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	300	-	-	-	300		
01 RM		-	300	-	-	-	300	160	
JUMLAH		3.683.882	1.393.733	-	-	-	5.077.615		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7473-4678-1133-8594

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

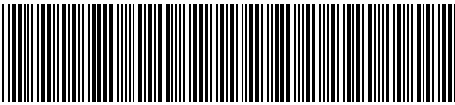
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.438	5.077.615
		BELANJA PEGAWAI	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	307.179	3.683.882
		BELANJA BARANG	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.259	1.393.733
		Dukungan Manajemen Administrasi Keseekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.107	423.438	5.077.615
		51 BELANJA PEGAWAI	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	306.973	307.179	3.683.882
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.134	116.259	1.393.733
		PERKIRAAN PENERIMAAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	157	600	1.757
		- PNPB (425131)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	157	600	1.757

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2025
IV A. B L O K I R



DS:7473-4678-1133-8594

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

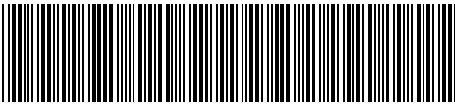
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 49.900 52 Belanja Barang Rp. 49.900		
005.01.WA 6986	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama		
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 49.900 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.01.2.401909/2025
IV B. C A T A T A N



DS:7473-4678-1133-8594

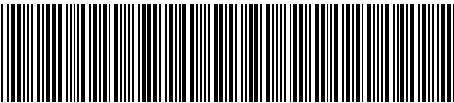
Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [401909] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Mahkamah Agung RI

ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H
NIP. 196711241992121001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.402017/2025**

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 - 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 - 3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 - 4. Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 - Sebesar : Rp. 151.990.000 (SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang
Rp. 151.990.000
Rp. 151.990.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	151.990.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN S E K A Y U (160) Rp. 151.990.000

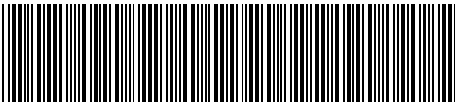
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4395-7860-1570-9529

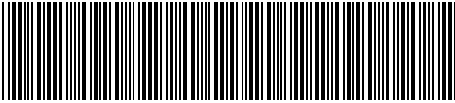
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

										Halaman : I A. 1
Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							151.990.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum							151.990.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum							
		2. 01	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu							
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum							
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara							
		5. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan							
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan				447,00	Perkara, Berkas Perkara		123.990.000
Rincian Output	:	01	BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat			447.00	Perkara		123.990.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				30,00	Orang		28.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)			30.00	Orang		28.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
I B. SUMBER DANA



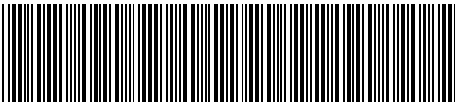
DS:4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	151.990.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	151.990.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0
(dalam ribuan rupiah)						

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Kewenangan : (KD)

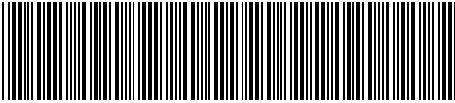
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7		9	10
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	-	151.990	-	-	-	151.990	11 . 09	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	151.990	-	-	-	151.990		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	151.990	-	-	-	151.990		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	123.990	-	-	-	123.990		
01	RM	-	123.990	-	-	-	123.990		
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	28.000	-	-	-	28.000		
01	RM	-	28.000	-	-	-	28.000	160	
JUMLAH		-	151.990	-	-	-	151.990		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

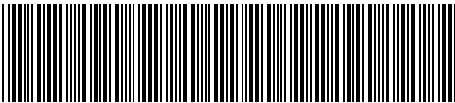
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI														
		RENCANA PENARIKAN DANA	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.730	151.990
		BELANJA BARANG	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.730	151.990
		Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.730	151.990
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660	12.730	151.990
		PERKIRAAN PENERIMAAN	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870	3.879	46.449
		- PNBP (425232)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
		- PNBP (425233)	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	359	4.275
005.03.BF.1049		- PNBP (425239)	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434	3.440	41.214	

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
IV A. B L O K I R



DS:4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

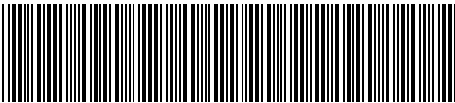
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.600 52 Belanja Barang Rp. 1.600		
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.600 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
IV B. C A T A T A N



DS:4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(401909)
Rp. 5,077,615,000

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 6986 6986.EBA	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,077,615,000	
				5,077,615,000	
				5,077,315,000	

6986.EBA.962 051 C 521252	Lokasi : KAB. BANYUASIN Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (KPPN.160-Sekayu) - Mesin Pompa Air Dorong	1.0 Laporan		700,000	RM
				700,000	
				700,000	
				700,000	
6986.EBA.994 001 A 511111	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 UNIT 1.0 Layanan	700,000	700,000 5,076,615,000 3,683,882,000 3,683,882,000 1,546,029,000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN		700,000 38,000 7,000 7,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN		114,934,000 98,514,000 8,210,000 8,210,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunj.Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN		31,531,000 27,063,000 2,198,000 2,270,000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN		28,140,000 24,120,000 2,010,000 2,010,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(401909)
Rp. 5,077,615,000

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			1,176,090,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	1,009,350,000	1,009,350,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 THN	83,370,000	83,370,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	83,370,000	83,370,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			156,140,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	124,638,000	124,638,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	15,751,000	15,751,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	15,751,000	15,751,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			93,812,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	93,812,000	93,812,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			421,977,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,000	421,977,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			55,560,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	50,000,000	50,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,780,000	2,780,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,780,000	2,780,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			37,070,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	31,776,000	31,776,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,647,000	2,647,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			9,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu)			3,704,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.0 THN	3,176,000	3,176,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	264,000	264,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	264,000	264,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB

(005)

MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG

(01)

Badan Urusan Administrasi

UNIT KERJA

(401909)

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

ALOKASI

Rp.

5,077,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Anak PPPK - Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	1,270,000 105,000 105,000	1,480,000 1,270,000 105,000 105,000	RM
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	4,200,000 350,000 350,000	4,900,000 4,200,000 350,000 350,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Beras PPPK - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	3,476,000 289,000 289,000	4,054,000 3,476,000 289,000 289,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	8,400,000	8,400,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,392,733,000	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			466,439,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Biaya Penjilitan - Air Minum Galon - Retribusi Sampah - Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN] - THR Sopir [1 ORG x 1 BLN] - THR Satpam [2 ORG x 1 BLN] - THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	1.0 THN 1.0 THN 12.0 KEG 12.0 OB 24.0 OB 60.0 OB 1.0 OB 2.0 OB 5.0 OB	2,000,000 6,000,000 150,000 3,931,000 3,931,000 3,574,000 3,931,000 3,931,000 3,574,000	395,419,000 2,000,000 6,000,000 1,800,000 47,172,000 94,344,000 214,440,000 3,931,000 7,862,000 17,870,000	RM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu) - Spanduk - Benner	1.0 THN 1.0 THN	6,000,000 5,000,000	11,000,000 6,000,000 5,000,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu) - Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 32 orang)	1.0 THN	60,020,000	60,020,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			222,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(401909)
Rp. 5,077,615,000

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Lisensi Vidio Conference [1 THN x 1 KEG] - Langganan Internet	1.0 THN 12.0 BLN	3,000,000 15,500,000	189,000,000 3,000,000 186,000,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	500,000	6,000,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan telpon	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Air	12.0 BLN	916,667	11,000,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Web Hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	RM
C	<u>Pemeliharaan Kantor</u>			426,970,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.160-Sekayu) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sumatera Selatan) - Pemeilharaan Rumah Genset	2496.0 M2 1.0 THN	78,102 1,396,000	194,942,000 1,396,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.160-Sekayu) - Bahan Bakar Genset [1 UT x 1 THN] - Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali) - Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali) - BBM Sewa Roda 4 - Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN] - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) - Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN] - Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN] - Perawatan AC [6 Unit x 1 THN] - Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	1.0 THN 6.0 Unit 65.0 Unit 1.0 UT 2.0 UT 4.0 UNIT 20.0 UT 4.0 UT 6.0 UT 5.0 UT	8,561,000 960,150 692,640 30,000,000 3,000,000 30,000,000 219,000 690,000 750,000 730,000	230,632,000 8,561,000 5,760,000 45,021,000 30,000,000 6,000,000 120,000,000 4,380,000 2,760,000 4,500,000 3,650,000	RM
D	<u>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</u>			100,724,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 5,077,615,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>			44,324,000	RM	
	(KPPN.160-Sekayu)					
	- Pakaian Dinas PPPK [1 ORG x 1 STEL]	1.0 STEL	978,000	978,000		
	- Pakaian Dinas CPNS [5 ORG x 1 STEL]	5.0 STEL	978,000	4,890,000		
	- Pakaian Dinas Hakim [7 ORG x 1 STEL]	7.0 STEL	978,000	6,846,000		
	- Pakaian Kerja Satpam (Sumatera Selatan) [2 ORG x 1 STEL]	2.0 STEL	1,630,000	3,260,000		
	- Pakaian Kerja Pramubakti [5 ORG x 1 STEL]	5.0 STEL	813,000	4,065,000		
	- Pakaian Kerja Pengemudi [1 ORG x 1 Stel]	1.0 STEL	813,000	813,000		
	- Pakaian Dinas Pegawai [24 ORG x 1 STEL]	24.0 STEL	978,000	23,472,000		
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>			56,400,000	RM	
	(KPPN.160-Sekayu)					
	- Honorarium Staf Pengelola [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	350,000	8,400,000		
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,330,000	15,960,000		
	- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000		
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	470,000	5,640,000		
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	530,000	6,360,000		
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,370,000	16,440,000		
E	<i>Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim Adhoc</i>			75,600,000		
522141	<u>Belanja Sewa</u>			75,600,000	RM	
	(KPPN.160-Sekayu)					
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	1,260,000	75,600,000		
F	<i>Pelantikan dan Sumpah Jabatan</i>			1,200,000		
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			1,200,000	RM	
	(KPPN.160-Sekayu)					
	- Jasa Rohaniawan [1 ORG x 4 KEG x 1 THN]	4.0 OK	300,000	1,200,000		
G	<i>Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama</i>			80,600,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			80,600,000	A	RM
	(KPPN.160-Sekayu)					
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 20 KEG]	80.0 OH	207,500	16,600,000	*	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 20 KEG]	80.0 OK	200,000	16,000,000	*	
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 20 KEG]	160.0 OH	300,000	48,000,000	*	
H	<i>Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL/KANWIL DJKN/BKN/BKD</i>			19,200,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			19,200,000	A	RM
	(KPPN.160-Sekayu)					
	- Uang Harian [2 ORG x 2 Hari x 12 KEG]	48.0 OH	300,000	14,400,000	*	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 12 KEG]	24.0 OH	100,000	2,400,000	*	
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 12 KEG]	24.0 OK	100,000	2,400,000	*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(401909)
Rp. 5,077,615,000

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	1.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		300,000	
6986.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen		300,000	
051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			300,000	
A	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi			300,000	
521211	Belanja Bahan			300,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 KEG	300,000	300,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 3 Desember 2024

Sekretaris



ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
NIP 197612032011011005

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(03)
(402017)
Rp. 151,990,000

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			151,990,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			151,990,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	447.0 Perkara, Berkas Perkara		123,990,000	

1049.BCA.U03	Lokasi : KAB. BANYUASIN Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	447.0 Perkara		123,990,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			48,985,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			48,985,000	
521211	Belanja Bahan			6,705,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penjilitan berkas perkara	447.0 PKR	15,000	6,705,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			42,280,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Alat Tulis Kantor	447.0 PKR	94,587	42,280,000	
052	Penetapan hari sidang			35,760,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			35,760,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			35,760,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang	447.0 KEG	80,000	35,760,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			2,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,400,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2,400,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	60.0 OK	40,000	2,400,000	
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan			20,940,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			20,940,000	
521211	Belanja Bahan			20,940,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Konsumsi Makan Terdakwa	447.0 OK	20,000	8,940,000	
	- Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	480.0 OK	25,000	12,000,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			2,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,400,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2,400,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	60.0 KEG	40,000	2,400,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			6,705,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			6,705,000	
521211	Belanja Bahan			6,705,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penjilitan Berkas Perkara	447.0 PKR	15,000	6,705,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(03)
(402017)
Rp. 151,990,000

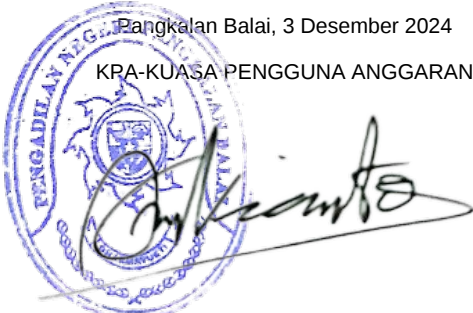
MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			5,600,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,600,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			2,400,000	RM
	- Pengiriman Berkas Banding	20.0 KEG	40,000	800,000	
	- Pengiriman Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 KEG	40,000	800,000	
	- Pengiriman Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 KEG	40,000	800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			3,200,000	A
	- Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 OK	80,000	1,600,000	*
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 OK	80,000	1,600,000	*
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			1,200,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,200,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,200,000	RM
	- Pengiriman Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 KEG	80,000	400,000	
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 OK	80,000	400,000	
	- Pengiriman Proses Kasasi/PK/Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 KEG	80,000	400,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	30.0 Orang		28,000,000	
1049.QBA.032	Lokasi : KAB. BANYUASIN Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	30.0 Orang		28,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			28,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			28,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			28,000,000	RM
	- Honorarium Advokat Piket [2 ORG x 2 JAM x 7 HARI x 10 BLN	280.0 OJ	100,000	28,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 3 Desember 2024
KRA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN


ANDRIANTO FACHRIZAL,S.Kom
NIP 197612032011011005